

EKSPANSI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN RESPONSIVITAS SEKTOR SWASTA

Haryo Kuncoro

Abstract

Any government plays an important role in an economy. The role is presented by both its revenue and expenditure. The net difference of the revenue and expenditure, therefore, determines the type of fiscal policy implementation. This research attempts to analyze the impact of fiscal policy on the private expenditure in the case of Indonesia over the 1969-1996 period. The analysis is based on the goods market equilibrium. The approach is designed to analyze whether the government expenditure crowds out the private expenditure. In order to reach the objective of the study, we use the Almost Ideal Demand System (AIDS). In estimating the AIDS we utilize the Seemingly Unrelated Regressions Estimation (SURE).

The estimation result of annual data shows that the government expenditure does not crowd out the private expenditure. Crowding out only occurs partially especially on the private investment. However, the government expenditure totally remains stimulate the private expenditure. This, in turn, leads to increase the gross domestic product. These results indicate that the fiscal policy effectively affects to the economic growth. However, to keep the moment of sustainable economic growth in the long term, the government should conduct discipline fiscal policy based on the prudent principles and coordination and consistency between fiscal and monetary controls.

Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin penting dalam perekonomian moderen. Aktivitas ekonomi sektor pemerintah ditunjukkan oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Pengeluaran pemerintah pada prinsipnya harus cukup dibiayai oleh penerimaan yang berasal dari dalam negeri. Selisih neto antara total penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah tersebut yang kemudian membedakan jenis kebijakan fiskal yang diimplementasikan.

Kebijakan anggaran ekspansioner (defisit) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Pada dasarnya kebijakan fiskal akan mentransfer daya beli masyarakat kepada pemerintah (melalui pajak, keuntungan, bea, dan pinjaman) dan kemudian mentransfernya kembali kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

dan didistribusikan menurut pertimbangan tertentu. Kebijakan anggaran ekspansioner ditempuh pada kondisi penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluarannya. Sebaliknya, kebijakan fiskal dikatakan kontraksi apabila total pengeluaran lebih kecil daripada total penerimaan. Dalam kondisi pengeluaran sama besar dengan penerimaan, kebijakan fiskal dikatakan berimbang.

Dalam literatur ekonomi, kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut dikhawatirkan akan mendesak (*crowding out*) pengeluaran sektor swasta. Pada akhirnya, kebijakan fiskal ekspansioner yang semula ditujukan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi secara makro justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi neto. Dengan demikian efektivitas kebijakan ekspansi anggaran sangat ditentukan oleh derajat responsivitas pengeluaran sektor swasta terhadap pengeluaran pemerintah.

Kekhawatiran akan terjadinya *crowding out* tersebut mendorong timbulnya pemikiran kembali terhadap strategi pembangunan, khususnya menyangkut peranan pemerintah dalam perekonomian. Munculnya liberalisasi perekonomian pada pertengahan tahun 1970-an dan privatisasi pada awal dasawarsa 1980-an merupakan contoh konkrit dari meningkatnya sentimen terhadap peranan pemerintah dalam perekonomian, sekaligus usaha untuk mengembalikan peranan pasar dalam menentukan alokasi dan distribusi sumber-sumber daya ekonomi (Ikhsan dan Basri, 1991).

Harus diakui bahwa mekanisme pasar tidak mampu berfungsi secara sempurna seperti yang dilukiskan Adam Smith. Pengalaman empiris membuktikan bahwa kegagalan peranan pemerintah (*government failure*) dalam perekonomian lebih besar dampak negatifnya dibandingkan dengan kegagalan pasar (*market failure*). Walaupun demikian, tidak semua intervensi pemerintah memberikan hasil yang negatif terhadap perekonomian. Penyediaan barang-barang publik merupakan salah satu contoh kebutuhan akan peranan pemerintah dalam perekonomian (Musgrave dan Musgrave, 1989). Makalah ini mencoba menelaah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan anggaran yang ekspansioner terhadap aktivitas sektor swasta pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

KAJIAN PUSTAKA

Dampak kebijakan fiskal ekspansioner terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan yang hangat. Dalam perspektif teoritis, sejauh ini belum ada kesepakatan yang tegas mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan fiskal ekspansioner. Paradigma Klasik menyatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif akan mendesak (*crowding out*) sumber-sumber

daya ekonomi produktif sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bernheim, 1989). Sebaliknya, pengikut Keynesian beranggapan bahwa kebijakan fiskal ekspansioner akan merangsang optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber ekonomi sehingga tidak akan menurunkan output nasional (Eisner, 1989). Sementara itu, pendekatan ekuivalensi Ricardian meyakini bahwa ekspansi anggaran pemerintah tidak ada pengaruh apapun (netral) terhadap pertumbuhan ekonomi (Barro, 1974, 1989).

Secara empiris, dampak kebijakan ekspansi anggaran pemerintah memberikan hasil yang mendua (*ambiguous*). Di pasar barang, studi Gramlich (1989) mendukung paradigma Neoklasik. Berdasarkan kajian data Amerika, ia menyimpulkan bahwa ekspansi anggaran pemerintah mempengaruhi penurunan pangsa relatif dan absolut tabungan sektor swasta. Penurunan tabungan swasta ini mengindikasikan terjadinya pengurangan investasi nasional. Studi Wray (1989) mendukung paradigma Keynesian. Dalam pengamatannya, ia memperoleh bukti bahwa ekspansi anggaran federal mampu menjelaskan variasi sebesar 295 persen dari pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan presiden Reagan. Sementara itu studi Carroll dan Summers (1987) dalam meneliti data Kanada dan Amerika menyimpulkan proposisi Ricardian, yaitu bahwa pengeluaran pemerintah netral terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk kasus Indonesia, studi mengenai topik yang sama belum banyak dilakukan. Studi yang pernah dilakukan pada umumnya masih bersifat parsial. Ikhsan dan Basri (1991) mengungkap ketidakberadaan fenomena *crowding out*. Dengan mempergunakan gabungan model akselerator pertumbuhan ekonomi Klasik dan Keynesian, Ikhsan dan Basri menunjukkan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan investasi swasta. Hubungan tersebut lebih bersifat komplementer

yang berarti sektor swasta merespon positif terhadap aktivitas sektor pemerintah.

Hasil di atas sejalan dengan studi Adjie (1995). Adjie mencoba menunjukkan eksistensi *crowding out* berdasarkan sumber pembiayaannya. Dua sumber pembiayaan yang dipertentangkan adalah hutang publik dan pajak. Dengan mengaplikasikan model konsumsi, ia menyimpulkan bahwa kedua sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah tersebut tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Konsekuensinya pertumbuhan ekonomi secara makro tidak mengalami koreksi.

Pada tulisan selanjutnya, Adjie (1996) mencoba menelaah fenomena *crowding out* melalui jalur suku bunga. Dalam studinya Adjie mengestimasi hubungan antara defisit anggaran pemerintah dengan tingkat bunga riil Indonesia. Hasil estimasinya menyimpulkan kebijakan ekspansi anggaran tidak berpengaruh nyata pada pergerakan tingkat bunga. Mengingat suku bunga merupakan harga dari investasi, implikasinya kegiatan investasi swasta tidak mengalami penurunan dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh.

Studi-studi di atas yang mengamati dampak aktivitas fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum cenderung mendukung paradigma Keynesian. Kendati demikian, beberapa perbedaan karakteristik yang berlaku umum dapat diidentifikasi. Mereka menspesifikasi ekspansi anggaran pemerintah dengan berbagai macam konsep atas dasar kepentingan masing-masing. Ikhsan dan Basri (1991) melokalisasi ekspansi anggaran yang khusus dialokasikan pada investasi pemerintah. Sementara Adjie (1996) memfokuskan ekspansi anggaran pada konsep ekspansi anggaran keseluruhan. Bahkan, Adjie (1995) menjeneralisasi ekspansi fiskal ke dalam anggaran pengeluaran pembangunan.

Chand (1977) dan Chelliah (1978) mengemukakan beberapa konsep pengukuran ekspansi anggaran. Masing-masing konsep

pengukuran akan memberikan indikator defisit anggaran yang berbeda pula. Untuk kasus Indonesia, dalam hal ekspansi anggaran dibiayai oleh sumber keuangan dari dalam dan luar negeri maka konsep pengukuran ekspansi fiskal yang mengacu pada defisit nilai tambah dan saldo domestik cenderung lebih tepat (Booth dan McCawley, 1983). Mengikuti konsep ekspansi anggaran nilai tambah, anggaran pemerintah perlu dibedakan ke dalam rekening lancar dan rekening modal. Dari kedua jenis rekening tersebut, selanjutnya dibedakan lagi dampaknya terhadap produk domestik bruto dan neraca pembayaran luar negeri. Dari identifikasi antara kedua dampak ekonomi ke dalam dan ke luar tersebut akan diperoleh saldo defisit anggaran domestik.

Atas dasar perbedaan konsep pengukuran ekspansi anggaran dan pengaruhnya terhadap perekonomian ini, paradigma Keynesian yang berlaku di Indonesia belum dapat diterima secara umum. Kerangka kerja yang lebih terintegrasi yang menghubungkan semua komponen aktivitas swasta dan dengan memperhatikan konsep-konsep defisit anggaran yang ada, diperlukan untuk menguji kembali keberlakuan paradigma Keynesian di Indonesia. Pada dasarnya fenomena *crowding out* lebih merupakan pekerjaan empiris daripada teoritis.

METODE PENELITIAN

Berbekal dari perbedaan konsep pengukuran ekspansi anggaran tersebut, penelitian ini mencoba menelaah dampak kebijakan fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kasus yang diambil sebagai objek penelitian adalah Indonesia untuk periode 1969-1996. Analisis dampak kebijakan ekspansi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi didekati dari keseimbangan di pasar barang domestik:

$$Y = C + I + G \quad (1)$$

Dampak kebijakan ekspansi anggaran pemerintah (G) terhadap

pendapatan nasional (Y) dapat diidentifikasi dari responsivitas pengeluaran sektor swasta yaitu konsumsi rumah tangga (C) dan pengeluaran investasi (I). Model responsi ini didasarkan pada asumsi ultrarasionalitas yang diajukan oleh David dan Scadding (1974). Ultrarasionalitas sektor rumah tangga menyatakan bahwa sektor perusahaan dan pemerintah merupakan ekstensi dari sektor rumah tangga itu sendiri sehingga pengeluaran pemerintah dipandang sebagai substitusi dari pengeluaran sektor swasta. Sektor rumah tangga menginternalisasikan perilaku bisnis yang mereka miliki dan menyesuaikan tabungannya terhadap perubahan tabungan sektor bisnis. Oleh karena itu, fenomena *crowding out* dapat terjadi dari substitusi langsung pada setiap penyesuaian terhadap tingkat bunga, inflasi, dan nilai kurs valuta asing (Arestis, 1985).

Dengan asumsi tersebut, penelitian ini mencoba menggunakan model estimasi sistem permintaan AIDS (*Almost Ideal Demand System*) yang dikembangkan oleh Deaton dan Muellbauer (1980). Spesifikasi model AIDS tersebut telah ekstensif digunakan dalam ekonomi mikro, khususnya untuk mengestimasi sistem permintaan barang dengan anggaran yang terbatas. Kemudahan yang terkandung dalam AIDS ini adalah bahwa proses estimasi mudah dilakukan. Selain itu, model AIDS tersebut tidak mensyaratkan data yang terperinci, sesuatu yang sangat jarang ditemui di negara-negara sedang berkembang. Lebih lanjut, model ini sangat cocok diterapkan untuk data agregatif yang dipublikasikan untuk konsumsi umum yang tidak mensyaratkan rincian data untuk setiap karakteristik pelaku ekonomi (Sadoulet dan De Janvry, 1995).

Model AIDS diderivasi dari suatu fungsi utilitas yang dispesifikasikan sebagai pendekatan derajat kedua (*second order approximation*) untuk setiap fungsi utilitas (Deaton dan Muellbauer, 1980). Fungsi permintaan AIDS selanjutnya diturunkan ke dalam pangsa (*share*) anggaran sebagai berikut:

$$(p_i q_i)/Y = s_i = a_0 + \sum b_{ij} \ln p_j + c_i \ln (Y/P) \quad (2)$$

$$\sum a_i = 1; \sum b_{ij} = \sum b_{ji} = 0; \sum c_i = 0$$

s_i adalah pangsa pengeluaran barang q_i terhadap total anggaran, p_i adalah harga barang i , dan P adalah indeks harga yang didefinisikan sebagai:

$$\ln P = a_0 + \sum a_k \ln p_k + \frac{1}{2} \sum \sum b_{jk} \ln p_k \ln p_j \quad (3)$$

Deaton dan Muellbauer (1980) menyarankan pendekatan perhitungan terhadap indeks harga P dengan indeks harga geometrik Stone:

$$\ln P^* = \sum s_i \ln p_i \quad (4)$$

Pendekatan linier ini lebih baik apabila ada kolinieritas antarharga komoditi selama waktu tertentu. Persamaan AIDS lebih lanjut dapat dituliskan sebagai:

$$s_i = a_i^* + \sum b_{ij} \ln p_j + c_i \ln (Y/P^*) \quad (5)$$

dalam hal ini $a_i^* = a_i - c_i \ln \phi$ dan $P = \phi P^*$ yang merupakan pendekatan terhadap P .

Pendekatan linierisasi AIDS harus diestimasi sebagai satu sistem persamaan dengan restriksi-riksasi tertentu terhadap beberapa nilai parameternya. Elastisitas harga untuk barang i dan j dan pendapatannya dapat diperoleh dari kalkulasi terhadap parameter-parameter yang diestimasi:

$$E_{ii} = -1 + (b_{ij}/s_i) - c_i \quad (6)$$

$$E_{ij} = (b_{ij}/s_i) - (c_j/s_i) s_j \quad (7)$$

$$E_{iY} = 1 + (c_i/s_i) \quad (8)$$

Estimasi parameter-parameter pada sistem permintaan AIDS (persamaan 5) ditempuh dengan metode SURE (*Seemingly Unrelated Regressions Estimation*) yang dikembangkan oleh Zellner (1962) agar diperoleh hasil estimasi yang efisien. Secara umum untuk mengestimasi SURE tersebut digunakan metode GLS (*Generalized Least*

Squares) (lihat misalnya: Pyndick dan Rubenfield, 1991). Hasil estimasi SURE ini akan ekuivalen dengan metode MLE (*Maximum Likelihood Estimators*) (Hall, Johnston, dan Lilien, 1990; Greene, 1995).

Dalam mengestimasi model AIDS, karena yang diestimasi adalah *share equation*, maka satu persamaan harus dikeluarkan dari set persamaan yang akan diestimasi untuk mendapatkan sistem persamaan yang simetris dan homogen serta untuk menghindari matriks varian-kovarian yang singular. Dalam proses estimasinya, eksekusi model akan dilakukan secara langsung terhadap pangsa komoditas konsumsi dan barang investasi, sedangkan untuk barang pemerintah akan diestimasi secara tidak langsung.

Dalam aplikasinya, metode SURE mensyaratkan dua tahap pemecahan. *Pertama*, mengestimasi masing-masing persamaan dengan OLS (*Ordinary Least Squares*) sehingga diperoleh residual untuk menghitung matriks kovarian. *Kedua*, masing-masing koefisien regresi pada sistem persamaan dihitung ulang pada proses iterasi kedua dengan memperhitungkan matriks kovarian residual antarpersamaan yang diperoleh sebelumnya. Pada setiap prosedur iteratif dilakukan, residual yang baru akan didapatkan sehingga matriks kovarian residual dapat diperbaharui untuk memperoleh koefisien regresi pada iterasi tahap berikutnya. Prosedur ini berkelanjutan sampai didapatkan nilai log-likelihood yang konvergen.

Berdasarkan estimasi model AIDS ini dapat ditetapkan berapa kaidah penyimpulan sebagai berikut:

- (1) Proposisi Neoklasik, yaitu bahwa *resources crowding out* terjadi apabila $E_{cg} < 0$, $E_{ig} < 0$, yaitu bahwa pengeluaran pemerintah mendesak komponen pengeluaran swasta.
- (2) Proposisi model Keynesian, yaitu bahwa *resources crowding out* tidak terbukti apabila $E_{cg} > 0$, $E_{ig} > 0$, serta
- (3) Paradigma ekuivalensi Ricardian, yaitu bahwa pengeluaran pemerintah netral

terhadap pengeluaran swasta apabila $E_{cg} = 0$, $E_{ig} = 0$.

Data dan Spesifikasi Variabel

Data yang diperlukan untuk estimasi adalah konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah. Ketiga variabel tersebut diturunkan dari komponen perhitungan pendapatan nasional menurut sisi pengeluaran. Konsumsi masyarakat terdiri dari dua komponen, yaitu konsumsi pemerintah dan swasta. Mengikuti konsep saldo ekspansi anggaran domestik, konsumsi pemerintah ditunjukkan oleh pengeluaran rutin pada APBN di luar pembayaran hutang dan cicilannya. Sedangkan konsumsi swasta diperoleh dari pendapatan nasional hasil perhitungan residual dari sisi produksi dan/atau sisi pendapatan faktor produksi, setelah dikurangkan dengan komponen pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Investasi merupakan pengeluaran swasta dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap meliputi pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang baru baik dari dalam maupun dari luar negeri; dan barang modal bekas dari luar negeri oleh sektor-sektor ekonomi. Pembentukan modal tetap mencakup pula perbaikan berat terhadap barang-barang modal. Mengikuti konsep saldo ekspansi defisit anggaran nilai tambah, komponen pengeluaran pemerintah ditunjukkan oleh pengeluaran pembangunan pada APBN. Pengeluaran pembangunan pemerintah ditujukan untuk menambah akumulasi modal masyarakat dalam bentuk sarana fisik dan prasarana dasar. Investasi pemerintah pada umumnya berupa penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan negara/swasta baik di dalam maupun di luar negeri.

Masing-masing variabel disajikan dengan harga konstan atas dasar tahun tertentu dan menurut harga berlaku. Pembagian antara masing-masing komponen pengeluaran

menurut harga yang berlaku dengan nilai pengeluaran menurut harga konstan akan diperoleh deflator untuk masing-masing pengeluaran. Ketiga deflator tersebut digunakan sebagai proksi untuk harga komoditas konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan konsumsi pemerintah. Kesemua deflator harga dinyatakan untuk tahun dasar 1983 ($1983=1$). Secara umum data untuk keperluan estimasi empiris ini diperoleh dari BPS, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan IMF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi dengan metode Zellner (1962) untuk ketiga persamaan di atas serta estimasi elastisitas harga dan pendapatannya untuk masing-masing komoditas disajikan berturut-turut pada tabel 1 dan 2. Secara statistik hasil estimasi model persamaan struktural AIDS khususnya untuk konsumsi masyarakat memberikan hasil yang kurang memuaskan. Meskipun demikian perhatian dan analisis tidak ditujukan pada hasil model struktural (tabel 1). Koefisien yang mempunyai arti secara ekonomi adalah persamaan turunannya yang menunjukkan indeks elastisitas harga masing-masing komoditas dan pendapatan (tabel 2).

Tanda arah koefisien yang diperoleh dari model sistem permintaan AIDS untuk masing-masing harga komoditas sudah sesuai dengan teori permintaan yang dijadikan basis referensi. Elastisitas harga terhadap masing-masing barang yang bersangkutan bernilai negatif. Nilai absolut dari ketiga indeks elastisitas tersebut sangat bervariasi. Elastisitas harga untuk ketiganya masing-masing adalah -0.92 , -0.58 , dan -1.47 untuk C, I, dan G. Ini berarti bila terjadi kenaikan harga masing-masing barang sebesar 1 persen, jumlah barang konsumsi, investasi, dan barang pemerintah yang diminta akan menurun rata-rata sebesar persentase elastisitasnya. Dari ketiga indeks elastisitas tersebut dapat diidentifikasi bahwa jumlah

barang konsumsi dan investasi yang diminta paling tidak responsif terhadap perubahan harga barang yang bersangkutan (elastisitas lebih kecil dari 1), sedangkan barang pemerintah mempunyai kecenderungan sebagai barang yang sangat peka terhadap harga (elastisitas lebih besar dari 1).

Pada tabel 2 ditampilkan pula elastisitas silang untuk ketiga jenis barang. Elastisitas silang antara barang pemerintah dengan barang konsumsi rumah tangga cenderung berhubungan positif. Sebaliknya, elastisitas harga antara barang pemerintah dengan barang investasi memperlihatkan tanda negatif. Sementara elastisitas antara konsumsi dengan investasi juga negatif. Tanda elastisitas silang yang negatif menunjukkan bahwa antara kedua barang yang bersangkutan berhubungan substitusi. Sementara tanda elastisitas silang yang positif menunjukkan bahwa antara kedua barang tersebut berhubungan komplementer.

Dari sisi rumah tangga, kenyataan ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan harga barang konsumsi, masyarakat akan mengurangi jumlah barang konsumsi yang diminta. Selanjutnya penurunan konsumsi ini juga akan mengurangi jumlah barang pemerintah yang diminta. Dari sisi yang lain, apabila terjadi kenaikan harga barang investasi, masyarakat akan mengurangi jumlah barang investasi yang diminta. Konsekuensi berikutnya masyarakat akan mengkompensasi pengurangan jumlah investasi yang diminta dengan kenaikan konsumsi barang pemerintah untuk mempertahankan tingkat kepuasannya. Dari sisi investor, kenaikan harga barang pemerintah cenderung akan mengurangi pengeluaran investasinya. Hal yang sama juga terjadi apabila terjadi kenaikan barang konsumsi. Dari sini dapat disimak bahwa pengeluaran investasi sangat ditentukan oleh ketersediaan barang konsumsi dan juga barang pemerintah.

Tabel 1
Hasil Estimasi Sistem Permintaan AIDS, 1969-1996

Koefisien	Estimasi	t-stat
Konsumsi Masyarakat		
a_1	0.5923223	1.0639
b_1	0.0540423	0.9473
b_2	-0.1138132	-3.3633
b_3	0.0597709 c	2.1893 a
c_1	0.0035145	0.0704
Pengeluaran Investasi		
a_1	-0.5286968	-1.8004
b_1	-0.1138132	-3.3633
b_2	0.1170527	4.2572
b_3	-0.0032395 c	-0.7949 b
c_1	0.0708147	2.6975
Pengeluaran Pemerintah		
a_1	0.9363745 d	3.0374 a
b_1	0.0597709 c	2.1893 a
b_2	-0.0032395 c	-0.7949 b
b_3	-0.0565314 c	-2.5098 a
c_1	-0.0743292 e	-2.7000 a

Catatan:

- a) *standard error* diambil dari estimasi langsung antara pangsa C dan G
- b) *standard error* diambil dari estimasi langsung antara pangsa I dan G
- c) dihitung berdasarkan restriksi $\sum b_i = 0$
- d) dihitung berdasarkan restriksi $\sum a_{ji} = 0$
- e) dihitung berdasarkan restriksi $\sum c_{ii} = 0$

Sumber: perhitungan penulis

Tabel 2
Estimasi Elastisitas Harga dan Pendapatan Sistem Permintaan AIDS, 1969-1996

	C	I	G	Y
C	-0.92167	-0.17361	+0.08996	+1.00532
I		-0.57471	-0.04485	+1.30013
G			-1.47074	+0.28332

Sumber: Diolah dari tabel 1

Dari sisi rumah tangga, kenyataan ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan harga barang konsumsi, masyarakat akan mengurangi jumlah barang konsumsi yang diminta. Selanjutnya, penurunan konsumsi ini juga akan mengurangi jumlah barang pemerintah yang diminta. Dari sisi yang lain, apabila terjadi kenaikan harga barang investasi, masyarakat akan mengurangi jumlah barang investasi yang diminta. Konsekuensi berikutnya masyarakat akan mengkompensasi pengurangan jumlah investasi yang diminta dengan kenaikan konsumsi barang pemerintah untuk mempertahankan tingkat kepuasannya. Dari sisi investor, kenaikan harga barang pemerintah cenderung akan mengurangi pengeluaran investasinya. Hal yang sama juga terjadi apabila terjadi kenaikan barang konsumsi. Dari sini dapat disimak bahwa pengeluaran investasi sangat ditentukan oleh ketersediaan barang konsumsi dan juga barang pemerintah.

Evaluasi terhadap koefisien harga ditujukan untuk melihat kemungkinan substitusi atau komplementaritas antarkomoditas. Pola perubahan pengeluaran swasta neto sebagai akibat dari aktivitas pengeluaran pemerintah tersebut terjadi pada kondisi di mana anggaran pendapatan konsumen tidak berubah. Apabila pendapatan masyarakat mengalami perubahan, maka hubungan antara kedua pengeluaran tersebut juga akan mengalami perubahan.

Selanjutnya evaluasi terhadap koefisien pendapatan ditujukan untuk melihat pola konsumsi atas pendapatannya. Dampak perubahan pendapatan konsumen terhadap masing-masing jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh koefisien pada variabel Y. Koefisien pendapatan masyarakat pada komponen C dan I tampak relatif hampir sama. Secara umum peningkatan jumlah barang pemerintah yang diminta sebagai akibat kenaikan pendapatan adalah paling kecil. Sementara peningkatan yang sama untuk barang investasi adalah paling besar.

Indeks elastisitas pendapatan yang positif ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam mengkonsumsi barang C, I, dan G bergerak di sepanjang garis ICC (*income consumption curve*). Dalam garis ICC tersebut, apabila harga komoditas mengalami perubahan maka setiap kenaikan pendapatan akan tetap meningkatkan permintaan ketiga komoditas. Efek yang menyebabkan perubahan jumlah barang yang dikonsumsi karena konsumen bergerak di sepanjang garis ICC yang baru ke tingkat yang lebih tinggi, di mana mengisyaratkan pengeluaran yang sama dengan pengeluaran sebelumnya dinamakan efek pengeluaran (*expenditure effect*).

Bukti empiris bahwa elastisitas harga silang antara barang pemerintah dengan barang konsumsi yang positif ini menunjukkan adanya fenomena *crowding in*. Sebaliknya bukti empiris bahwa elastisitas harga silang antara barang pemerintah dengan barang investasi yang negatif ini menunjukkan adanya fenomena *crowding out*. Secara makro kondisi ini disebut sebagai *partial crowding out*. Pengeluaran pemerintah tidak seluruhnya mengurangi komponen pengeluaran swasta. Sektor swasta merespon negatif hanya pada pengeluaran investasinya.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa paradigma Klasik terbukti untuk barang investasi, sedangkan paradigma Keynesian terbukti untuk kasus barang konsumsi. Berdasarkan nilai perubahan konsumsi dan investasi sebagai akibat kenaikan harga barang pemerintah, yang besarnya masing-masing +0.09 dan -0.04, secara totalitas pengeluaran pemerintah tetap akan meningkatkan pengeluaran neto swasta (yaitu konsumsi dan investasi), yaitu rata-rata sebesar +0.05.

SIMPULAN

Penelitian ini mencoba mengamati dampak kebijakan fiskal ekspansioner pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui responsi aktivitas

ekonomi sektor swasta. Temuan yang diperoleh adalah bahwa kebijakan ekspansioner pada pengeluaran pembangunan tidak menyebabkan terjadinya *crowding out* di pasar barang domestik. Desakan pengeluaran pembangunan dari pemerintah hanya terjadi secara parsial pada komponen pengeluaran investasi swasta (paradigma Klasik berlaku). *Crowding out* tidak terjadi atas pengeluaran konsumsi masyarakat (paradigma Keynesian berlaku). Secara totalitas, kebijakan ekspansi anggaran tersebut tetap akan meningkatkan pengeluaran sektor swasta. Total respon yang positif terhadap aktivitas ekspansi fiskal sektor pemerintah di pasar barang, sebagai akibatnya, tidak menyebabkan penurunan output nasional.

Hasil di atas menyarankan keharusan adanya disiplin fiskal yang mengacu pada kebijakan kehati-hatian (*prudent policy*) agar tidak terjadi desakan terhadap pengeluaran investasi swasta secara berlebihan. Implementasi kebijakan fiskal, oleh karenanya, perlu disesuaikan dengan situasi perekonomian makro agar terpelihara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan surplus seyogyanya diterapkan pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebaliknya kebijakan ekspansi anggaran ada manfaatnya ditempuh pada saat terjadi resesi ekonomi. Lebih lanjut, dalam upaya untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, *policy mix* yang terkoordinasi dan konsisten antara kebijakan fiskal dan moneter guna menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal menjadi strategi kunci dalam manajemen ekonomi makro.

Selanjutnya, penajaman prioritas pengeluaran pembangunan untuk proyek-proyek yang betul-betul produktif seyogyanya dilakukan agar tercapai efisiensi dan efektivitas pengeluaran pembangunan. Penajaman proyek ini merupakan "harga" yang harus dibayar oleh pemerintah atas

kebijakan ekspansi anggaran yang diimplementasikan. Pemilihan prioritas ini layak diberikan pada sektor-sektor yang belum terjangkau oleh sektor swasta. Pada saat yang bersamaan, intervensi pemerintah pada sektor-sektor yang telah mampu dilaksanakan sepenuhnya oleh sektor swasta perlu ditinjau lagi keuntungan dan kerugiannya secara makro. Proses restrukturisasi pada lingkup yang sempit dan privatisasi dalam lingkup yang lebih luas terhadap beberapa BUMN perlu dipercepat.

Tulisan ini hendaknya tidak dipandang sebagai dukungan terhadap kebijakan fiskal ekspansioner yang telah ditempuh pemerintah. Defisit anggaran pemerintah memang tidak selamanya berdampak negatif bagi perekonomian seperti telah ditunjukkan oleh studi ini. Sungguhpun demikian, defisit anggaran yang berlebihan harus diakui merupakan satu masalah yang harus diperhatikan juga. Bagaimanapun, pemerintah hendak meningkatkan pengeluaran pembangunan guna menstimulasi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, hendaknya tetap memperhatikan beban/akibat ekonomi yang akan dipikul oleh generasi mendatang.

Sekecil apapun prestasi pembangunan ekonomi yang dapat dicapai, dalam jangka panjang tentu akan lebih "bermakna" apabila dibiayai oleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari dalam negeri, misalnya pajak atau pinjaman dalam negeri. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan pajak dan pinjaman dalam negeri sebagai alternatif sumber pembiayaan ekspansi anggaran pemerintah. Selanjutnya, apakah kedua sumber pembiayaan tersebut akan potensial menimbulkan *crowding out*? Sebuah pertanyaan yang menggelitik untuk disimak jawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, A.D., (1995), "Is Public Debt Neutral? Evidence for Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 10, No. 1, halaman: 21-34.
- Adjie, A.D., (1996), "Can Indonesia Sustain her Budget Deficits?: An Overview", *Ekonomi dan Industri*, PAU Studi Ekonomi UGM, Vol. 3, No. 1, halaman: 69-83.
- Arestis, P., (1985), "Is There Any Crowding Out of Private Expenditure by Fiscal Actions", dalam P. Arestis dan T. Skouras (Edt.), *Post Keynesian Economic Theory: A Challenge to Neo Classical Economics*, Sussex, Wheatsheaf Books.
- Barro, R.J., (1974), "Are Government Bonds Net Wealth?", *Journal of Political Economy*, Vol. 82, No. 3, November/Desember, halaman: 1095-1117.
- Barro, R.J., (1989), "The Ricardian Approach to Budget Deficits", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 3, No. 2, halaman: 37-54.
- Bernheim, B.D., (1989), "A Neoclassical Perspective on Budget Deficit", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 3, No. 2, halaman: 55-72.
- Booth, A. dan P. McCawley, (1983), "Kebijakan Fiskal", dalam A. Booth dan P. McCawley, *Ekonomi Orde Baru*, terjemahan Boediono, Jakarta, LP3ES, halaman: 166-212.
- Carroll, C. dan L.H. Summers, (1987), "Why Have Private Saving Rates in the United States and Canada Diverge?", *Journal of Monetary Economics*, Vol. 20, No. 3, September, halaman: 249-279.
- Chand, S.K., (1977), "Summary Measures of Fiscal Influence" *International Monetary Fund Staff Paper*, Vol. 24, No. 2, Juli, halaman: 405-449.
- Chelliah, R.J., (1978), "Significance of Alternative Concepts of Budget Deficit", *International Monetary Fund Staff Paper*, Vol. 25, No. 3, November, halaman: 741-784.
- David, P.A. dan J.L. Scadding, (1974), "Private Saving: Ultrarationality, Aggregation, and Denison's Law", *Journal of Political Economy*, Vol. 82, No. 2, Maret/April, halaman: 225-249.
- Deaton, A. dan Muellbauer, J., (1980), "An Almost Ideal Demand System", *American Economic Review*, Vol. 70, No. 3, Juni, halaman: 312- 326.
- Eisner, R., (1989), "Budget Deficit: Rhetoric and Reality", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 3, No. 2, halaman: 73-93.
- Gramlich, E.M., (1989), "Budget Deficit and National Saving: Are Politicians Exogenous?", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 3, No. 2, halaman: 23-35

- Greene, W.H., (1991), *Econometric Analysis*, Singapore, MacMillan Publishing Company.
- Hall, R.E., J. Johnston, dan D.E. Lilien, (1990), *MicroTSP: User's Manual, Version 7.0e*, California, Quantitative Micro Software.
- Ikhsan, M. dan M.C. Basri, (1991), "Investasi Swasta dan Pemerintah; Substitusi atau Komplementer?: Kasus Indonesia", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 39, No. 4, Desember, halaman: 359-391.
- Musgrave, R.A. dan P.B. Musgrave, (1989), *Public Finance in Theory and Practice*, edisi kelima, Singapore, McGraw-Hill Company.
- Pyndick, R.S. dan D.L. Rubinfeld, (1991), *Econometric Model and Economic Forecast*, edisi ketiga, New York, McGraw-Hill Book Co.
- Sadoulet, E. dan A. de Janvry, (1995), *Quantitative Development Policy Analysis*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- Wray, L.R., (1989), "A Keynesian Presentation of Relations among Government Deficit, Investment, Saving, and Growth", *Journal of Economic Issues*, Vol. 13, No. 4, Desember, halaman: 977-1002.
- Zellner, A., (1962), "An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias", *Journal of American Statistical Association*, Vol. 57, Juni, halaman: 348-368.